

ANALISIS IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Enggri Yani Ristanti¹, Khotim Fadhli²

^{1,2}Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang

²Email : enggriyaniristanti29@gmail.com, khotim@unwaha.ac.id

URL: <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2590>

DOI: <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v6i2.2590>

Abstract

Welfare is a severe problem that the government must solve. The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) of the Indonesian government seeks to enhance the welfare of the people who are less fortunate in the country. This study was done in Pojokkulon Village, Kesamben District, Jombang Regency to learn how the Non-Cash Food Program was run and how it affected community welfare. The descriptive technique and the qualitative research are used in this work. Data is gathered by observation, interviews, and documentation. The findings demonstrated that the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) was being implemented in Pojokkulon Village in accordance with the rules and was operating well, despite not yet being completely formed. One of the three indicators examined—the behavior of the implementer—is felt to be unsatisfied because each BPNT disbursement schedule is not followed and there are still frequent delays in disbursement—despite the fact that the target group's behavior and the interorganizational relationships' behavior are both felt to have been satisfied. This is because two of the three indicators examined—the behavior of interorganizational relationships and the behavior of the target group—are both felt to have been satisfied. The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is warmly received by Pojokkulon Village residents and Beneficiary Families (KPM). The Phase I Prosperous Family now includes the Beneficiary Families (KPM) of Pojokkulon Village, who weren't really affluent previously.

Keyword: *Implementation, Non-Cash Food Assistance, Community Welfare*

Abstrak

Kesejahteraan adalah masalah berat yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di tanah air. Kajian ini dilaksanakan di Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang untuk mempelajari bagaimana Program Bantuan Pangan Non Tunai dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Teknik deskriptif dan penelitian kualitatif digunakan dalam pekerjaan ini. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di Desa Pojokkulon telah sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya terbentuk. Dari ketiga indikator yang diperiksa, yaitu perilaku pelaksana, dirasakan kurang puas karena setiap jadwal pencairan BPNT tidak diikuti dan masih sering terjadiketerlambatan pencairan. Keduanya merasa puas. Hal inikarena dua dari tiga indikator yang diperiksa, perilaku hubungan antar organisasi dan perilaku kelompok sasaran sama-sama dirasa telah puas. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disambut hangat warga Desa Pojokkulon dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keluarga Sejahtera Tahap I kini beranggotakan KeluargaPenerima Manfaat (KPM) Desa Pojokkulon yang sebelumnya tidak begitu sejahtera.

Kata Kunci:Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Kesejahteraan Masyarakat

Pendahuluan

Salah satu masalah utama dan fokus perhatian pemerintah adalah masalah kesejahteraan. Di Indonesia, masalah kesejahteraan bukanlah hal baru.(Fadhli & Fahimah, 2021). Masalah kesejahteraanakan selalu menjadi topik yang relevan untuk didiskusikan. Partisipasi Indonesia dalam pembahasan Sustainable Development Objectives (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan aktualisasi.(Muslim et al., 2019).

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab Negara adalah “menjaga segenap bangsa Indonesia sekaligus menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan negeri.”.(Fanny & Megawati, 2022). Sila Pancasila kemudian menanamkan tujuan nasional ini melalui sila kedua, Sila keempat adalah "Kemanusiaan yang adil dan beradab", sedangkan sila kelima adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Data kesejahteraan masyarakat Indonesia tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Sumber: DTKS Tahun 2022

Program bantuan sosial yang sudah ada sejak sebelum pandemi covid-19 secara eksklusif fokus pada rumah di 40% kelompok miskin terbawah dan tetap memanfaatkan database DTKS yang dibuat sebelum pandemi covid-19 dimulai.(Fadhli et al., 2021).

Di sisi lain, Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. KPM menerima bantuan sembako nontunai dari Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dikembangkan pemerintah bersama dengan bank penyalur untuk menciptakan sistem pembayaran elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membayar sembako dari e-Warung.(Safitri et al., 2021).

Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai dalam rangka membantu pelaksanaan program BPNT. Baru-baru ini, pemerintah menjadikan program ini sebagai kebijakan public dalam upaya

membantu masyarakat kurang mampu untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu.(Suryana, 2021).

Presiden mengapresiasi kemampuan program BPNT dalam meringankan beban keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menyediakan sebagian kebutuhan pangan mereka, menjamin peserta KPM makan dengan gizi seimbang, meningkatkan efektifitas penargetan dan waktu penerimaan bantuan pangan, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Program Padi Sejahtera (Rastra) yang memiliki sejumlah isu digantikan dengan program BPNT. Tanda-tanda target kanan dapat diperhatikan ketika Kesalahan Pengecualian dan Kesalahan Inklusi masih ada. Kesalahan pengecualian, artinya rumah tertentu seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar. Karena kesalahan inklusi, beberapa tempat tinggal mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan.(Julianto, 2020).

Karena keterbatasan Program Rastra, pemerintah mulai mengubahnya menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2016 dan 2017. (BPNT). Dengan anggaran sebesar Rp. 1,69 triliun dan total 1.286.194 keluarga penerima manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimulai di 44 kota(Kementerian/Lembaga Lintas Sektor, 2019).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (KPM) memiliki dua tujuan, yaitu memangkas pengeluaran untuk kebutuhan pangan masyarakat dan memberikan akses pangan sehat bagi rumah tangga penerima. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2017 dengan biaya sebesar Rp. 110.000 per KPM.(Nabila et al., 2021), Harga dinaikkan menjadi Rp. 200.000,- per KPM setiap bulannya di tahun 2019.

Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang berpenduduk 3.509 jiwa. Seluruh 126 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tiga dusun tersebut pada akhirnya akan mendapatkan bantuan sembako nontunai. Sejak tahun 2018, Desa Pojokkulon telah merasakan manfaatdari Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Diharapkan dengan menawarkan program BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), beban keuangan akan berkurang sehingga KPM dapat naik menjadi Keluarga Sejahtera Tahap I. Hal ini sangat mungkin terjadi karena setiap bulan, mereka mendapatkan pencairan melalui KKS yang ditukarkan di e-Warung dalam bentuk sembako, berupa beras, telur, dan ayam.

Namun kajian oleh (Hasimi, 2020) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sembako nontunai BPNT hanya dapat memenuhi tiga syarat, yaitu tepat kuantitas, tepat biaya, dan tepat kualitas. Karena tidak satu pun indikator kesejahteraan seperti pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan ekonomi masyarakat tidak terpenuhi, masyarakat miskin tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Akibatnya, meski menerima BPNT, masyarakat tidak bisa merasa seperti menerima bantuan.(Hasimi, 2020).

Metode Penelitian

Metode ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, hipotesis dibuat melalui penyelidikan kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dengan

menggunakan informasi yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dimana peneliti melakukan observasi. Di Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dilakukan penyelidikan. Data sekunder berasal dari buku, makalah, dan jurnal, sedangkan data primer berasal dari informan penelitian. Untuk mengumpulkan informan untuk penelitian ini, strategi yang dikenal sebagai seleksi purposive, yang melibatkan pemilihan sumber data secara acak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, digunakan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi semua digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, tiga jenis prosedur analisis data yang digunakan: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Metodologi implementasi Soren C. Winter digunakan oleh para peneliti (Edoardus E. Maturbongs, 2011) yang mengkaji perilaku lintas organisasi, perilaku implementasi, dan perilaku kelompok sasaran untuk menyelidiki bagaimana penyaluran bantuan sembako nontunai (BPNT).

a. Perilaku Hubungan Antar Organisasi

Koordinasi dan dedikasi adalah faktor organisasi. Agar perubahan luas menjadi peraturan yang eksplisit, interaksi antarorganisasi diperlukan untuk implementasi kebijakan. Ada beberapa metode untuk melakukan proses implementasi kebijakan. Salah satu strategi untuk mengadopsi kebijakan adalah melakukannya di dalam satu organisasi.

Kinerja melibatkan kolaborasi dan koordinasi dengan banyak organisasi atau bagian organisasi agar berhasil dan efisien (Wahono et al., 2020). Semua pihak ini awalnya menjangkau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pojokkulon sebelum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sebelum dilakukan sosialisasi, Perangkat Desa mengundang para KPM agar dapat berkumpul di Balai Desa. Selanjutnya KPM diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang harus dibawa pada setiap pencairan BPNT. Hasil sosialisasi yang disampaikan Pemerintah Desa dibantu dengan Pendamping BPNT kepada KPM, agar masyarakat memahami prosedur dari program BPNT yang diambil dari *e-Warung*.

b. Perilaku Implementator

Anda dapat memilih dimensi. Kapasitas untuk menerapkan dan mengelola pilihan-pilihan kunci dengan menggunakan pengaruh yang lebih kuat di luar otoritas resmi adalah tujuan dari hal ini. Saat menyampaikan kebijakan, mereka mengutamakan hubungan dengan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai, perilaku pelaksana menjadi faktor penentu (BPNT). Pemilik e-Warung dan Asisten BPNT khususnya membantu dalam hal ini. Mereka aktif mengambil bagian dalam penyerahan bantuan sembako nontunai bagi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pojokkulon.

KPM mungkin akan lebih mudah mendapatkan bantuan ini dengan bantuan penyaluran BPNT dan teknologi mutakhir. Seberapa cepat keluarga penerima KPM mendapatkan bantuan non tunai. Seorang pendamping BPNT akan berperan sebagai pimpinan agen e-Warung yang ditugaskan di Desa Pojokkulon. Sebelumnya Pemilik e-Warung juga sudah menyiapkan bahan sembako untuk diberikan kepada KPM. Namun untuk pengambilan BPNT, jadwal pencairannya belum tepat waktu dan masih ada keterlambatan dari pihak pemerintah.

c. Perilaku Kelompok Sasaran

Perilaku kelompok sasaran tidak hanya memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga seberapa efisien birokrat dan pejabat tingkat bawah beroperasi. Masyarakat yang menerima bantuan di Desa Pojokkulon ikut andil melaksanakan aturan di dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai, baik buruknya. Perilaku KPM ini mempengaruhi implementasi itu sendiri dan mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam penyaluran BPNT tersebut. Mayoritas Keluarga Penerima Manfaat sudah 3 tahun menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan mereka merasa perekonomiannya cukup terbantu terutama menambah kebutuhan gizi karena bahan pangan dari e-Warung kualitasnya baik.

Ketiga faktor tersebut menimbulkan kesimpulan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojokkulon belum terlaksana dengan baik. Salah satu indikasi perilaku pelaksana belum terpenuhi karena masih ada keterlambatan dan tidak konsisten di setiap penyaluran BPNT. Terdapat dua indikator yaitu perilaku interaksi antar organisasi dan perilaku kelompok sasaran yang telah terpenuhi.

2. Kesejahteraan Masyarakat Desa Pojokkulon Dengan Adanya Program Bantuan Non Tunai (BPNT)

Kesejahteraan sosial adalah kemampuan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan dasar anggotanya, seperti sandang, pangan, dan papan. Wabah Covid-19 juga menjadi pendorong bagi penyusunan rencana pemulihan ekonomi nasional yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Fadhli & Rohmah, 2021). Setiap masyarakat harus memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya agar menjadi sehat. Program BPNT Desa Pojokkulon diharapkan bagi masyarakat yang menerima bisa mencapai taraf kesejahteraan.

Keluarga Penerima Manfaat atau yang disebut dengan KPM mendapatkan bantuan nontunai berupa sembako antara lain beras, unggas, dan telur sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah. Implementasi kebijakan program BPNT dikatakan berhasil jika

memberikan pengaruh positif dalam pengurangan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut studi lapangan, Program BPNT telah mengembangkan kesejahteraan pada masyarakat yang menerima bantuan. Keluarga sejahtera tahap I meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Pojokkulon. Hal ini ditunjukkan dengan setiap anggota KPM makan minimal dua atau tiga kali sehari, mengkonsumsi daging satu atau dua kali seminggu, memenuhi kebutuhan sandang minimal dua kali dalam setahun, tinggal di rumah dengan atap, lantai, dan tembok, dapat membawa anggota keluarganya yang sakit ke fasilitas medis, dan memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan.

Simpulan

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari hasil dan analisis penelitian ini: 1). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pojokkulon sudah efektif dan sesuai aturan meski belum sepenuhnya dilaksanakan. Dua dari tiga indikasi yang diteliti, perilaku hubungan antar organisasi dan perilaku kelompok sasaran diperkirakan telah terpenuhi, namun indikator ketiga, perilaku pelaksana, dianggap kurang karena penundaan yang terus-menerus. Kegagalan untuk mematuhi jadwal pencairan BPNT atau keterlambatan pencairan; dan 2). Kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat meningkat karena adanya Bantuan Pangan Non Tunai yang membantu masyarakat Desa Pojokkulon. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya merupakan rumah tangga kaya tahap I di Desa Pojokkulon, dulunya adalah keluarga miskin. Para peneliti telah menawarkan pedoman dan saran berikut dalam mendukung program BPNT guna dipertimbangkan dan dikembangkan: 1). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diproyeksikan akan disalurkan setiap bulan merupakan kewajiban berkala pemerintah. Untuk mengurangi gangguan, diperlukan tanggapan dari pihak terkait modernisasi fasilitas mesin EDC; 3). Menghidupkan kembali Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk maju ketahap kedua.

Referensi

- Edoardus E. Maturbongs. (2011). *Model Implementasi Kebijakan Publik Soren C. Winter*.
- Fadhli, K., & Fahimah, D. A. N. (2021). PENGARUH PENDAPATAN, PENDIDIKAN, DAN GAYA HIDUP TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN SOSIAL COVID-19. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2770>
- Fadhli, K., Himmah, S. R., & Taqiyuddin, A. (2021). Analisis Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(3), 110–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2777>
- Fadhli, K., & Rohmah, Z. M. (2021). The Effect of the National Economic Recovery Program on MSME Productivity During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis STIE Indragiri*, 10(1), 103–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.34006/jmbi.v10i1.286>

- Fanny, N. R. F., & Megawati, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. *Publika*, 10(2), 407–418.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(01), 61–72. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>
- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam: The Leader's Writing*, 1(1), 38–43. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i1.77>
- Kementerian/Lembaga Lintas Sektor. (2019). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai* (1st ed.). Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Muslim, H. P., Eriyanti, F., & Mubarak, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 60–68. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.19>
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(2), 303–309. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i2.21327>
- Safitri, I. F., Mubarak, M., & Hudallah. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (di Dusun Wedegan Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Bojonegoro). *NiCMA: National Conference Multidisciplinary*, 1(1), 487–497.
- Suryana, A. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 2(1), 21–30.
- Wahono, H. T. T., Fadhli, K., & Amrulloh, M. N. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN IKLIM KOMUNIKASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA (Studi Pada Tenaga Kerja Klinik Pratama Aulia Jombang). *MARGIN ECO: Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis*, 4(2), 75–88. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/margin/article/view/2395>